

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Keinginan kuat dari Negara Ukraina ingin bergabung dengan “geng militer” NATO yang dari segi historis dibentuk untuk menyaingi Uni Soviet, membuat Vladimir Putin, presiden Rusia menjadi naik pitam, karena jika Ukraina bergabung dengan NATO, maka organisasi yang dibentuk untuk menyaingi militer Uni Soviet<sup>1</sup> tersebut dapat membangun pangkalan militer di Kiev, Ibu Kota Ukraina dan ini dapat membahayakan Rusia karena Kiev berdekatan dengan Moskow, Ibu Kota Rusia. Karena dapat menimbulkan bahaya bagi Rusia maka presiden Putin mengambil langkah untuk menginvasi Ukraina, dimulai dari kota Kiev pada 24 Februari 2022 lalu dan terjadilah perang antara Rusia dan Ukraina.

Rusia dan Ukraina, dulunya bersama dengan Belarusia adalah satu wilayah dari sebuah negara bernama Kiev Rus atau Kyivan Rus (yang mungkin menginspirasi nama-nama tempat di kedua negara) 1.200 tahun lalu di Lembah Sungai Dnieper yang sekarang berada di Ukraina. Kiev Rus mencakup keseluruhan wilayah Ukraina modern, sebagian wilayah Belarusia dan wilayah barat Rusia modern. Tak heran jika Rusia dan Ukraina, menurut Vladimir Putin merupakan satu bangsa yang sama (terutama dalam hal

---

<sup>1</sup> Oertel, M.A., Janka, “*The United Nations and NATO*”, Bonn: University of Jena-Universitas Kiel, Hal. 2

budaya dan sejarah).<sup>2</sup> Tentu sangat disayangkan bagi Putin mengetahui bahwa Ukraina memiliki keinginan bergabung dengan NATO di Barat daripada bertahan bersama Rusia di *Commonwealth of Independent States* (CIS).

*Commonwealth of Independent States* atau CIS adalah pesemakmuran yang berisikan negara-negara merdeka yang dibentuk Rusia, Ukraina, Belarusia dan beberapa negara bekas Uni Soviet lainnya sebagai negara-negara yang menyepakati bubarnya Uni Soviet yang ditandai dengan mundurnya Mikhail Gorbachev (pemimpin terakhir Uni Soviet). Terbentuknya CIS tersebut ialah melalui Piagam CIS yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari negara-negara anggota CIS termasuk didalamnya Boris Yeltzin (Presiden pertama Rusia) dan Leonid Kravchuk (Presiden pertama Ukraina).<sup>3</sup>

Kedua negara awalnya damai dan saling berhubungan baik sampai pada konflik pertama mereka pada tahun 2005. Pasca kemerdekaan, Ukraina memiliki hubungan yang memanas dengan Rusia, yaitu pada saat Viktor Yushchenko memenangkan kursi kepresidenan Ukraina pada tahun 2005.<sup>4</sup> Yushchenko cenderung “memesrakan” Ukraina ke Uni Eropa dibandingkan Rusia yang membuat tegang hubungan Rusia dan Ukraina. Hubungan

---

<sup>2</sup> Haris Fadhil, “*Putin: Kami Berperang dengan Neo-Nazi Rusia dan Ukraina Adalah Satu Bangsa*”. detikNews, <https://news.detik.com/internasional/d-5967521/putin-kami-berperang-dengan-neo-nazi-rusia-dan-ukraina-adalah-satu-bangsa>, diakses pada 26 Mei 2022

<sup>3</sup> *Executive Secretariat and Independent States, “Multilateral Charter of the Commonwealth of Independent States (with declaration and decisions). Adopted at Minsk on 22 January 1993. Authentic text : Russian . 1819, no. 31139 (1994).*

<sup>4</sup> “*Hari Ini Yushchenko Dilantik Sebagai Presiden Ukraina*”, modifikasi terakhir 2005, <https://news.detik.com/berita/d-277383/hari-ini-yushchenko-dilantik-sebagai-presiden-ukraina>. Diakses pada 25 Mei 2022

Ukraina-Rusia mulai reda pasca pemilu 2010 yang memutuskan Viktor Yanukovych menjadi Pemimpin Ukraina menggantikan Yushchenko. Yanukovych ialah sosok yang lebih condong ke Rusia dan ia ingin agar Ukraina bertambah “dekat” ke Moskow (ibu kota Rusia).<sup>5</sup>

November 2013, Ukraina telah dipengaruhi oleh ketegangan dengan adanya demonstrasi yang pecah di ibukota, Kiev. Massa banyak yang kontra dengan kebijakan Yanukovych untuk menolak perjanjian integrasi ekonomi yang lebih luas dengan Uni Eropa,<sup>6</sup> karena ia memang pro kepada Rusia. Setelah tindakan keras oleh pasukan keamanan, demonstrasi massa dan konflik meningkat berpunca pada triwulan pertama tahun 2014, tepatnya pada bulan Februari, ketika itu DPR Ukraina mencopot sang Presiden dari tampuk kekuasaannya. Penggulingan Yanukovych memicu ketegangan dan ricuh di dalam tubuh pemerintah Ukraina. Pemerintah pecah menjadi dua keompok, yaitu pro-Eropa dan pro-Rusia. Suporter Uni Eropa kebanyakan dari rakyat dan politikus daratan Ukraina, dilain pihak, orang-orang yang mendukung Rusia kebanyakan merupakan rakyat dan politikus Krimea yang berada di semenanjung dekat kawasan Laut Hitam.

Tahun 2014, Krimea, sebuah wilayah di Selatan Ukraina yang ditempati banyak orang yang berbahasa Rusia dan suku Tatar,<sup>7</sup> Krimea meminta bantuan Rusia dalam menyelesaikan konflik internal. Pemerintah Rusia

---

<sup>5</sup> Riza Andriani dan Jeanita Attata, “Upaya Resolusi Konflik Rusia-Ukraina”, 2022

<sup>6</sup> Fahri Ananta Said, “Dampak Kudeta Presiden Viktor Yanukovych Dalam Hubungan Luar Negeri Ukraina Dengan Uni Eropa”, *International dan Diplomacy* 3, no. 1, 2017

<sup>7</sup> Y U Kurniadi, “Peran Uni Eropa Dalam Menangani Konflik Di Ukraina melalui European Neighbourhood Policy (ENP) Tahun 2014-2019”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 2, 2020, Hal. 408–420.

menyetujui dan mengirim pasukan untuk menguasai Krimea. Hal ini dilakukan oleh Rusia karena posisi geopolitik wilayah tersebut memang strategis dan dapat digunakan oleh Rusia untuk meningkatkan pengaruhnya di Eropa Timur dan Timur Tengah. Uni Eropa, yang menyaksikan intervensi Rusia dalam perang saudara Ukraina, juga menyalahkannya. Kemudian, pada Juli 2014, situasi di Ukraina memburuk dan Amerika Serikat (AS) serta Uni Eropa menentang Rusia.

Perang Rusia-Ukraina yang pecah February 2022 lalu hingga sekarang ini juga karena Ukraina ingin bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Keinginan Ukraina untuk meningkatkan ketegangan antara kedua belah pihak. NATO sendiri merupakan organisasi pertahanan dan keamanan di kawasan Atlantik Utara, termasuk negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Kanada.<sup>8</sup> Beberapa negara bekas Uni Soviet, seperti Lituania, Estonia dan Latvia juga merupakan anggota NATO.

Terlalu banyak intervensi dan campur tangan Rusia terhadap masalah internal Ukraina membuat Ukraina merasa terancam kedaulatannya hingga memiliki keinginan untuk bergabung dengan NATO, karena mustahil bagi Ukraina seorang untuk menyaingi militer Rusia yang ganas. Konflik antara kedua negara memuncak ketika Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis pro-Rusia di Ukraina timur, Donetsk dan Luhansk. Hal ini

---

<sup>8</sup> Satrio Pringgondani, "*Kebijakan Pertahanan Rusia Dan Dampaknya Terhadap NATO*", 2016, hal. 49, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

disampaikan oleh Putin dalam pidatonya di televisi pemerintah,<sup>9</sup> "Saya percaya perlu mengambil keputusan yang sudah lama tertunda, untuk segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk," kata Putin. Dalam pidatonya, Putin mengatakan negara-negara Barat telah mengkritik masalah keamanan Rusia selama bertahun-tahun dengan memindahkan NATO ke timur dan membawa infrastruktur militer lebih dekat ke perbatasan Rusia. Pada puncaknya, Putin juga menyerukan invasi ke wilayah Ukraina pada 24 Februari 2022.

Pihak-pihak yang berperang wajib mematuhi ketentuan mengenai perang yang berlaku global, misalnya Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa yang diantaranya hanya membunuh antar pasukan musuh, bukan wartawan ataupun sipil, termasuk pengungsi, hal ini sudah dijelaskan dalam konvensi Jenewa IV tahun 1949 pada pasal 14 mengenai pengungsi. Bahkan, Rusia sekalipun boleh saja menampung pengungsi dari Kiev dan sekitarnya, karena para pengungsi sejatinya sudah hilang kewarganegaraannya. Namun pada 11 Maret 2022 lalu, menurut laporan dari Intelijen Pertahanan Ukraina, Rusia dituduh menembak mati 7 orang pengungsi dari kota Kiev,<sup>10</sup> bahkan salah satunya anak-anak, dimana diketahui, anak-anak keselamatannya lebih diprioritaskan daripada orang dewasa. Jika tuduhan tersebut benar maka Rusia sudah melakukan crimes against humanity atau yang disebut sebagai

---

<sup>9</sup> Aditya Jaya Iswara dkk., "*Sejarah Konflik Rusia Vs Ukraina*", diakses April 27, 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/25/060500265/sejarah-konflik-rusia-vs-ukraina?page=all>.

<sup>10</sup> <https://kumparan.com/kumparannews/ukraina-sebut-rusia-tembak-mati-7-pengungsi-di-dekat-kiev-termasuk-seorang-anak-1xfn4EHIZ64> diakses pada Maret 2022

kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan piagam Nuremberg<sup>11</sup> dengan melakukan kejahatan perang berupa pembunuhan warga sipil tak bersalah dan/atau pengungsi.

Data terbaru menyebutkan terdapat lebih dari 5 juta orang dari Ukraina meninggalkan negaranya sebagai pengungsi, seperti dikutip dari jejaring resmi *United Nation High Commissioner for Refugees* atau biasa disingkat UNHCR yang berbunyi:<sup>12</sup> “*Over 7.9 million individual refugees from Ukraine recorded across Europe since 24 February*”<sup>13</sup> yang artinya sudah ada lebih dari 17 persen atau hampir satu per lima dari total rakyat Ukraina yang sudah menjadi pengungsi (total 45 Juta data tahun 2016) telah melarikan diri ke negara-negara terdekat di Eropa (belum dengan pengungsi yang lari ke Asia) dari Ukraina terhitung sejak dimulainya serangan pada 24 Februari dan akan terus meningkat selama invasi Rusia ke Ukraina masih berlangsung.

Selain dari Kasus 7 orang pengungsi yang ditembak mati, Pada Maret lalu diketahui, Presiden Prancis, Emmanuel Macron akan membuat aturan dalam rangka memperketat kebijakan migrasi terhadap pelanggar ketertiban umum atau secara khusus Macron akan mengusir para pengungsi dari negaranya. Tetangga Prancis, Inggris membuat program yang bertajuk “Rumah untuk Ukraina” yakni program untuk memberi bantuan kebutuhan

---

<sup>11</sup> David Luban, “*A Theory of Crimes Against Humanity*”, *Yale Journal of International Law* 167 (2004): 85–167.

<sup>12</sup> <https://www.unhcr.org/ukraine-emergency.html>. Diakses 18 Maret 2022

<sup>13</sup> “*Ukraine-Humanitarian Response Plan 2022 (February 2022)*”, <https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-humanitarian-response-plan-2022-february-2022-enuk>. Diakses 15 Januari 2023

primer kepada para Pengungsi Ukraina, namun, menurut laman *The Guardian*, per Juni 2022 terdapat setidaknya 480 keluarga Ukraina telah mengajukan permohonan ke pemerintahan setempat untuk bantuan terhadap tunawisma. Belanda, yang tadinya dengan baik hati menerima para pengungsi Ukraina tinggal di rumah-rumah warganya, menginjak musim panas pada Juni lalu akhirnya mengusir secara halus para pengungsi Ukraina ke penampungan.

Kasus-kasus diatas menunjukkan bahwa kepengurusan pengungsi belum maksimal di banyak negara dan bahkan banyak orang dari berbagai negara belum paham konsekuensi dari menerima pengungsi di negaranya atau bahkan tidak melakukan persiapan yang matang sebelum menerima pengungsi di negara masing-masing. Padahal semua negara yang peneliti sebut diatas, sudah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 maupun Konvensi Jenewa, bahkan mengenai kepengurusannya, sudah dibantu oleh UNHCR, namun masih saja belum efektif.

Gejolak konflik ini pada realitanya menyebabkan jutaan orang mengungsi dan hidup dalam kesusahan, namun, komunitas internasional tidak tinggal diam melihat lahirnya fenomena pengungsi ini, baik fenomena pengungsian yang terjadi dulu (contoh: pengungsi Vietnam di Pulau Galang, Batam Tahun 1979) maupun yang sekarang seperti pengungsi Ukraina. PBB pada tahun 1951 menyepakati suatu perjanjian mengenai pengungsi beserta protokol tambahannya pada 1967 yang mana keduanya secara khusus

membahas dan mengatur mengenai pengungsi yang dikenal sebagai Konvensi Pengungsi 1951 (dikenal juga dengan Konvensi Jenewa 1951).

Melihat Invasi Rusia ke Ukraina yang menyebabkan gelombang Invasi besar-besaran dan isu mengenai tidak terpenuhinya hak-hak pengungsi Ukraina di beberapa negara Eropa, maka, dengan menilik pada Konvensi Pengungsi 1951, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “HAK DAN KEWAJIBAN PENGUNGGSI UKRAINA (Studi Atas Konvensi Pengungsi 1951)”. Penelitian ini membatasi *locus* dari negar yang menjadi kajian seperti Inggris, Romania dan Portugal. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangsih dan masukan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum terutama hukum internasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada banyak pembaca agar mendapatkan wawasan dan pengetahuan mengenai pengungsi dan hukum kepengungsian, serta memberikan informasi kepada praktisi, akademisi, aparat penegak hukum dan masyarakat serta pihak yang terkait dengan pelaksanaan misi kemanusiaan oleh para *stakeholder* sebagai pengembangan ilmu dan bahan masukan dalam menangani pengungsi.



## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk Analisa terhadap hak dan kewajiban pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pengungsi Ukraina di beberapa negara Eropa berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk Analisa mengenai hak dan kewajiban pengungsi yang didasarkan pada Konvensi Pengungsi 1951
2. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pengungsi Ukraina di beberapa negara Eropa berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis, diharapkan nantinya hasil penelitian ini dapat memberikan:

1. Sumbangan pemikiran terhadap pengembangan dan penegakan Hukum Internasional, khususnya dalam memahami hak dan kewajiban pengungsi dengan mengambil contoh nyata yakni pengungsi Ukraina,
2. Dapat berguna dalam menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan masyarakat terkhusus pada pemenuhan hak pendidikan bagi anak pengungsi di negara transit.

3. Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemenuhan hak pendidikan bagi anak pengungsi di negara transit serta menjadi bahan kajian lebih lanjut

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberi manfaat:

1. Bagi masyarakat, memberikan sumber informasi bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, khususnya mengenai pemenuhan hak dan kewajiban pengungsi Ukraina.
2. Bagi akademisi, memberikan sumbangan ilmu dalam meningkatkan perkembangan ilmu, khususnya mengenai pemenuhan hak dan kewajiban pengungsi Ukraina.